

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan otonom dalam menjalankan tugasnya untuk mengaudit pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara. Keberadaan BPK RI pertama kali diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada Pasal 23 ayat (5) yang berbunyi: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang."

Berdasarkan Surat Penetapan Pemerintah No. 11/OEM tanggal 28 Desember 1946 yang menetapkan pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan ini mulai beroperasi pada 1 Januari 1947 dengan kantor sementara di Magelang. Pada awal pembentukannya, BPK hanya memiliki sembilan pegawai, dan R. Soerasno ditunjuk sebagai ketua pertama. Untuk melaksanakan tugasnya, BPK mengeluarkan surat No. 94-1 tanggal 12 April 1947 yang memberitahukan seluruh instansi di wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara. Salah satu tugas utama BPK adalah memeriksa laporan keuangan dari pemerintah serta instansi-instansi pemerintah lainnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan tiga jenis pemeriksaan utama, salah satunya adalah pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan ini berfokus pada evaluasi laporan keuangan pemerintah untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan mencerminkan tingkat kewajaran yang memadai. Hasil dari pemeriksaan ini berupa opini yang diberikan oleh BPK, seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atau opini lainnya. Opini ini menjadi indikator penting dalam menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, sekaligus mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik.

Selain pemeriksaan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melaksanakan pemeriksaan kinerja yang bertujuan untuk menilai pengelolaan keuangan negara dari tiga aspek utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara hemat (ekonomi), tanpa pemborosan (efisiensi), dan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (efektivitas). Dengan demikian, pemeriksaan kinerja memberikan masukan yang berharga untuk meningkatkan pengelolaan program pemerintah dan membantu pemerintah mengoptimalkan hasil dari penggunaan anggaran yang ada.

Jenis pemeriksaan ketiga yang dilakukan BPK adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang berfokus pada isu-isu spesifik di luar cakupan pemeriksaan keuangan dan kinerja. Pemeriksaan ini meliputi berbagai hal, seperti evaluasi terhadap aspek keuangan tertentu, investigasi atas dugaan penyimpangan, serta pengujian terhadap pengendalian internal pemerintah. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan untuk menangani masalah-masalah yang memerlukan perhatian khusus, seperti kasus dugaan korupsi atau inefisiensi yang signifikan.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugasnya, BPK RI berusaha untuk memperluas jaringan kantornya. Hingga tahun 1996, BPK RI hanya memiliki tiga perwakilan, yaitu Perwakilan I di Medan, Perwakilan II di Yogyakarta, dan Perwakilan III di Makassar. Perwakilan II Yogyakarta sebelumnya bertanggung jawab atas pemeriksaan di beberapa daerah, salah satunya ialah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pemilihan objek penelitian pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah didasarkan pada perannya yang strategis dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah di provinsi yang memiliki 35 kabupaten/kota. Kompleksitas pengelolaan keuangan daerah yang beragam memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Visi dan Misi Organisasi

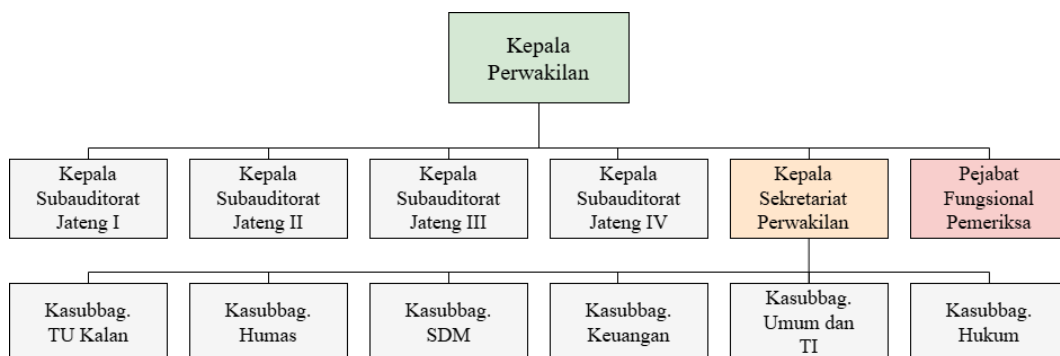
Visi dari BPK Perwakilan Jawa Tengah adalah menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk

berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan . Adapun misi dari BPK Perwakilan Jawa Tengah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; dan
2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Struktur Organisasi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara efektif, BPK Perwakilan Jawa Tengah memiliki struktur organisasi yang terdapat pada Gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

(Sumber: Data BPK RI Perwakilan Jawa Tengah)

Cakupan wilayah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mencakup seluruh wilayah administratif provinsi ini. Untuk memastikan efektivitas dalam proses pemeriksaan, wilayah tersebut dibagi menjadi empat bidang pemeriksaan, masing-masing menangani beberapa kota dan kabupaten tertentu sebagai berikut:

1. Bidang Pemeriksaan Jateng I

Bertanggung jawab atas pengawasan keuangan di pusat pemerintahan provinsi serta beberapa wilayah strategis lainnya. Area yang termasuk dalam cakupan bidang ini meliputi Provinsi Jawa Tengah, Kota

Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Rembang. Wilayah ini mencakup pusat pemerintahan dan ekonomi utama di Jawa Tengah, sehingga peran pemeriksaannya sangat krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

2. Bidang Pemeriksaan Jateng II

Memiliki fokus pemeriksaan pada kota dan kabupaten yang berada di wilayah tengah dan timur Jawa Tengah, termasuk daerah dengan aktivitas ekonomi dan industri yang cukup signifikan. Wilayah yang masuk dalam cakupan bidang ini adalah Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen.

3. Bidang Pemeriksaan Jateng III

Mencakup daerah di bagian barat daya dan tengah provinsi, termasuk wilayah pegunungan dan perbatasan dengan provinsi lain. Area yang menjadi tanggung jawab dalam bidang ini adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo.

4. Bidang Pemeriksaan Jateng IV

Menangani pemeriksaan di wilayah barat laut Jawa Tengah, mencakup daerah pesisir serta kabupaten yang memiliki aktivitas ekonomi berbasis industri dan pertanian. Wilayah yang diperiksa oleh bidang ini mencakup Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemalang.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Sejak dimulainya otonomi daerah dan reformasi keuangan pada awal tahun 2000, telah terjadi perubahan signifikan dalam iklim pemerintahan. Akuntabilitas dan transparansi kini menjadi nilai utama yang dipegang teguh dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan ini menunjukkan kemajuan dalam

memperbaiki sistem pemerintahan, yang diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang tidak hanya efisien, tetapi juga dapat dipercaya oleh masyarakat. Transformasi ini menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga pemerintah, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya tata kelola yang baik dan berwibawa.

Audit pemerintahan adalah salah satu komponen krusial dalam upaya penegakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Mardiasmo dalam Herry Syafrizal et al. (2018) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara menjadi hal yang sangat vital, mengingat anggaran negara berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat.

Untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, maka dibentuklah lembaga independen yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menjadi acuan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penerapan SPKN ini telah diatur secara rinci dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 12 November 2023, sejumlah auditor BPK ditetapkan sebagai tersangka bersama pejabat daerah. Para tersangka antara lain mencakup Kepala Perwakilan, Ketua Tim Pemeriksa, dan pejabat pemeriksa lainnya. Dalam penanganan kasus tersebut, KPK menemukan adanya dugaan suap yang diberikan agar opini audit yang diberikan kepada pemerintah daerah tetap positif.

Sebelumnya, masih di tahun 2023, seorang auditor juga diduga terlibat dalam kasus suap proyek jalur kereta api dengan nilai mencapai Rp28,6 miliar. Selain itu, dalam kasus yang menyeret mantan Bupati Bogor, Ade Yasin, ditemukan adanya upaya pemberian suap senilai Rp1,93 miliar kepada tim pemeriksa BPK

melalui perantara, guna mengarahkan opini audit menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kasus ini memperlihatkan bagaimana intervensi terhadap proses audit bisa terjadi jika auditor tidak menerapkan prinsip skeptisisme dan profesionalisme secara optimal (Setuningsih, 2024).

Fenomena lainnya ialah kasus yang menjerat anggota III BPK, Achsanul Qosasi, yang diduga menerima suap dalam aliran dana dari Kementerian Pertanian. Sebelumnya, pada tahun 2019, anggota BPK Rizal Djalil juga terbukti menerima suap dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR (Sutrisna & Ihsanuddin, 2024).

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan internal auditor serta pentingnya memperkuat faktor-faktor pendukung kualitas audit seperti skeptisisme profesional, *time budget pressure*, dan *workload*. Walaupun kasus-kasus tersebut terjadi di wilayah atau unit BPK yang berbeda, namun secara umum menggambarkan adanya risiko umum yang dapat mengancam kualitas audit.

El Badlaoui et al. (2021) menjelaskan kualitas audit merupakan salah satu tujuan utama dalam proses audit yang harus dilaksanakan oleh profesional yang kompeten, independen, dan berpengalaman. Audit harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku umum untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada pengguna laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar laporan auditor dapat memastikan bahwa laporan keuangan serta informasi terkait disajikan sesuai dengan standar auditing tanpa adanya kesalahan material.

Kualitas audit juga menjadi dasar pertimbangan penting dalam proses pemilihan auditor (Khairunisa et al., 2017). Kualitas audit yang rendah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif tambahan yang berpengaruh terhadap pandangan masyarakat terutama penilaian pada kualitas audit BPK. Dijelaskan oleh Yolanda et al. (2019) sikap auditor dalam melaksanakan tugas audit tercermin dalam hasil pemeriksaan laporan keuangan yang andal serta sesuai dengan standar yang berlaku dan telah ditetapkan.

Penulis menyimpulkan bahwa kualitas audit merefleksikan tingkat profesionalisme dan kepatuhan auditor terhadap standar pemeriksaan yang berlaku

dalam melaksanakan prosedur audit. Kualitas audit tidak semata-mata diukur dari ada atau tidaknya temuan, melainkan dari ketepatan prosedur, ketelitian pelaksanaan, serta kemampuan auditor dalam menyusun laporan berdasarkan prinsip objektivitas dan integritas. Dengan demikian, audit dikatakan berkualitas apabila seluruh proses pemeriksaan dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan kaidah pemeriksaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit seperti dijelaskan pada paragraf sebelumnya, salah satunya yaitu skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional mengacu sikap yang ditunjukkan dengan selalu mempertanyakan dan meragukan setiap informasi, serta menilai bukti audit secara kritis untuk mengambil keputusan berdasarkan keahlian audit yang dimilikinya (Rahayu, 2020).

Menurut Santoso et al. (2020) skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin tinggi tingkat skeptisisme profesional seorang auditor, semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Skeptisisme profesional mencerminkan pola pikir yang selalu kritis, waspada terhadap potensi kesalahan penyajian yang bisa terjadi akibat kecurangan maupun kekeliruan, serta mempertimbangkan bukti audit secara cermat sebelum mengambil keputusan. Sementara hasil penelitian Tawakkal, (2019) menunjukkan bahwa sikap skeptisme auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Penyebabnya adalah skeptisisme dalam proses audit sudah dianggap sebagai bagian yang wajar dan merupakan tantangan yang harus diatasi dengan baik.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas audit yaitu *time budget pressure*. Menurut Sososutikno dalam Suwantari dan Adi (2020) *time budget pressure* adalah kondisi yang mengharuskan auditor untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan waktu atau bekerja dengan batasan waktu yang sangat ketat yang telah ditetapkan. Penelitian oleh Fauzan et al. (2021) menjelaskan bahwasanya *time budget pressure* mempunyai pengaruh pada kualitas audit.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan waktu yang dirasakan auditor, semakin besar dorongan untuk menyelesaikan audit tepat waktu. Akibatnya, dalam proses pemeriksaan, auditor mungkin mengabaikan beberapa prosedur audit yang penting, sehingga peluang untuk mengidentifikasi temuan

menjadi berkurang dan pada akhirnya memengaruhi kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Octavia et al. (2019) mengungkapkan *time budget pressure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dapat diartikan bahwa peningkatan tekanan anggaran waktu yang dialami auditor tidak serta-merta menyebabkan penurunan kualitas audit yang dihasilkan.

Di sisi lain, beban kerja yang berlebihan (*workload*) juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Menurut Putra dan Nelvirita (2022) beban kerja (*workload*) merupakan jumlah tugas yang harus diselesaikan oleh auditor dalam jangka waktu tertentu, yang dapat memengaruhi kinerja individu auditor. López dan Peters dalam Fadhillah dan Halmawati, (2021) *workload* terjadi akibat musim sibuk (*busy season*) yang biasanya berlangsung di awal periode. Akibatnya, auditor mengalami lonjakan beban kerja yang signifikan dalam jangka waktu tertentu, yang dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan berpotensi menurunkan ketelitian serta akurasi dalam proses audit.

Menurut Persellin et al. (2019) dalam penelitiannya, ditemukan bahwa beban kerja selama proses audit dapat berdampak negatif terhadap kualitas audit. Hal ini terlihat dalam banyak kasus, di mana auditor mungkin masih dapat mengelola kondisi yang lebih ringan, tetapi jika tekanan meningkat, mereka berisiko tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Nelvirita (2022) bahwa *workload* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa *workload* secara langsung menentukan kualitas audit. Meskipun pada kuartal pertama auditor menghadapi *busy season*, auditor tetap dapat mengantisipasi dan memahami beban kerja yang akan dihadapi.

Hasil penelitian yang berbeda-beda, mendorong penulis untuk menganalisis hubungan antara skeptisisme profesional, *time budget pressure*, dan *workload* terhadap kualitas audit dalam audit pemerintahan. Pemahaman mendalam mengenai ketiga variabel ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru untuk mengidentifikasi solusi praktis dalam meningkatkan kualitas audit. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi BPK dan instansi terkait

untuk memperbaiki kebijakan pengelolaan sumber daya manusia serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung integritas dan profesionalisme auditor.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti ingin mengajukan judul penelitian sebagai berikut:

“PENGARUH SKEPTISISME PROFESIONAL, *TIME BUDGET PRESSURE* DAN *WORKLOAD* TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH)”

1.3 Perumusan Masalah

Seiring dengan semakin kompleksnya lingkungan audit, berbagai penelitian terus mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, mengingat ruang lingkup dan pendekatan penelitian yang bervariasi. Dalam penelitian ini, tiga faktor utama yang akan dianalisis adalah skeptisisme profesional, *time budget pressure*, dan *workload*. Pemilihan variabel ini didasarkan pada tantangan yang sering dihadapi auditor selama proses pemeriksaan.

Skeptisisme profesional merupakan faktor penting dalam menjaga kualitas audit, karena auditor yang memiliki tingkat skeptisisme tinggi cenderung lebih cermat dalam menilai bukti audit dan lebih mampu mengidentifikasi potensi kecurangan. Auditor kerap bekerja dalam batasan waktu yang ketat, yang dapat menimbulkan tekanan psikologis dan berpotensi mengurangi ketelitian dalam proses audit. Tekanan ini sering kali terjadi karena tuntutan efisiensi agar audit selesai dalam waktu singkat. Dampak dari *time budget pressure* dapat beragam, mulai dari peningkatan stres kerja hingga pengurangan ketelitian dalam pemeriksaan. Selain itu, beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan dan menurunkan efektivitas auditor dalam mendeteksi kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan.

Dengan mempertimbangkan ketiga faktor tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana skeptisisme profesional, *time budget pressure*, dan *workload* berpengaruh terhadap kualitas audit di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi auditor dalam pelaksanaan audit serta

menjadi bahan pertimbangan bagi BPK dalam meningkatkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia dan sistem pengawasan internal guna menjaga kualitas audit yang optimal.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa hasil deskriptif skeptisisme profesional, tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*), dan beban kerja (*workload*) secara bersamaan berpengaruh terhadap kualitas audit di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah skeptisisme profesional, tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*), dan beban kerja (*workload*) secara bersamaan berpengaruh terhadap kualitas audit di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) berpengaruh terhadap kualitas audit di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah?
5. Apakah beban kerja (*workload*) berpengaruh terhadap kualitas audit di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui hasil deskriptif skeptisisme profesional, tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*), dan beban kerja (*workload*) secara bersamaan berpengaruh terhadap kualitas audit di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah?
2. Menganalisis pengaruh skeptisisme profesional, tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*), dan beban kerja (*workload*) secara bersamaan terhadap kualitas audit di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

3. Menguji pengaruh skeptisisme profesional terhadap kualitas audit di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
4. Menguji pengaruh tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) terhadap kualitas audit di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
5. Menguji pengaruh beban kerja (*workload*) terhadap kualitas audit di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik, khususnya dalam bidang audit, dengan menambah wawasan mengenai pengaruh skeptisisme profesional, tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*), dan beban kerja (*workload*) terhadap kualitas audit.
- b) Bagi penelitian di masa depan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pembandingan dalam kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit, terutama dalam konteks audit sektor publik di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam terkait bagaimana skeptisisme profesional, *time budget pressure*, dan *workload* dapat berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan. Dengan demikian, BPK dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan sumber daya manusia serta meningkatkan akurasi dan integritas audit yang dilakukan.
- b) Bagi Auditor, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya sikap skeptis dalam mendeteksi kesalahan atau potensi kecurangan dalam audit, serta bagaimana tekanan waktu dan beban kerja dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Dengan kesadaran ini, auditor diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya guna memastikan hasil audit yang lebih berkualitas.

- c) Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPK sebagai lembaga pemeriksa yang transparan dan profesional dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam menjaga kualitas audit yang efektif dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Dengan demikian, integritas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dapat terus terjaga di mata publik dan lingkungan sekitarnya.

1.6 Sistematika Penelitian

Penulisan tugas akhir ini disusun dalam lima bab, di mana setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang membahas aspek penelitian secara sistematis. Secara ringkas, sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan, termasuk lokasi penelitian serta latar belakang yang menguraikan fenomena yang mendasari penelitian ini. Selain itu, dijelaskan pula landasan teori yang relevan, serta penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penyusunan penelitian ini. Bab ini juga mencakup perumusan masalah yang berdasarkan latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian, sehingga membentuk ruang lingkup penelitian jelas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pembahasan mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dalam penelitian ini mencakup aspek kualitas audit, skeptisisme profesional, time budget pressure, dan beban kerja (*workload*). Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, bab ini menyusun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Sub-bab terakhir dalam bab ini membahas hipotesis penelitian, yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang dikaji dan masih perlu diuji kebenarannya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam penelitian untuk menyelesaikan permasalahan yang dikaji.

Pembahasan dalam bab ini meliputi karakteristik penelitian, metode pengumpulan data, tahapan penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, teknik pengambilan sampel, sumber data, serta pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Selain itu, teknik analisis data dan metode pengujian hipotesis juga dijelaskan secara rinci untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan standar ilmiah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis data, yang kemudian diuraikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap bagian dalam bab ini diawali dengan penyajian data yang telah dianalisis, kemudian dilakukan interpretasi terhadap hasil tersebut, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan sementara yang mengacu pada temuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang dirangkum berdasarkan temuan utama dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran dari penulis yang bersifat konkret dan aplikatif, baik dalam aspek teoritis maupun praktis, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam praktik audit.